

Rangkaian Kegiatan KTT ASEAN ke 18:

SIMPOSIUM TENTANG “MENUJU KOMUNITAS ASEAN BERBASIS MASYARAKAT: Penguatan UKM di ASEAN” (Towards a People-Centered ASEAN Community: Strengthening SMEs in ASEAN)

Dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke 18, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia /ERIA), telah menyelenggarakan Simposium Akbar dengan tema: “Towards a People-Centered ASEAN Community: Strengthening SMEs in ASEAN”. Simposium sehari tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2011, bertempat di Auditorium Nareswara, Gedung SMESCO UKM dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari kalangan UKM, pemerintah, diplomat, akademisi, asosiasi dan media masa.

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, yang juga sebagai Ketua Menteri Ekonomi ASEAN menyampaikan pidato kunci. Pada kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, menyampaikan pidato persetujuan hasil rekomendasi Simposium. Para pembicara dan moderator Simposium tersebut berasal dari berbagai kalangan terpilih yaitu LIPI, LPEM-FEUI, TNP2K, Trisakti, dan CSIS dan juga dari OECD, ERIA dan universitas ternama dari ASEAN dan Australia.



Menteri Perdagangan bersama para Pembicara dan Moderator

Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan mengharapkan agar simposium tersebut menghasilkan rekomendasi konkrit tentang apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk mendekatkan ASEAN kepada rakyat melalui UKM. Dalam pada itu Menteri Perdagangan menekankan perlunya pembahasan tentang

(1). Menjadikan UKM mendapatkan manfaat dari pasar tunggal ASEAN dan pasar ASEAN + 1 (dari ASEAN + 1 FTA); (2) Pengembangan program-program ASEAN dengan memfasilitasi UKM menggunakan TIK/ICT dan internet lebih agresif untuk memperluas pasar UKM dan sumber-sumber bahan baku dan masukan secara lebih murah; dan (3) mengidentifikasi ketrampilan dan training wirausaha UKM untuk memanfaatkan teknologi baru secara efektif (contoh website) dan keuangan formal.

Menteri Koperasi dan UKM, dalam sambutannya menekankan bahwa dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di ASEAN adalah UKM dan melalui merekalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) mengukur dampaknya kepada rakyat, maka sangat penting untuk meneliti, dan membentuk arsitektur integrasi regional yang tertuang dalam AEC Blueprint dari sudut pandang pengembangan UKM di regional

ASEAN; seperti halnya pertumbuhannya, penyesuaian dan partisipasi dalam keterkaitan ekonomi dan perdagangan di ASEAN dan Asia Timur. Karenanya sangat perlu bagi ASEAN untuk menempatkan UKM sebagai pusat/center dalam proses pengembangan dan integrasi ASEAN. Menteri Koperasi dan UKM juga memuji rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam simposium tersebut.



Menteri Koperasi dan UKM bersama para Pembicara dan Moderator

Rekomendasi yang dihasilkan dalam Simposium adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pedoman / Indeks Kebijakan bagi UKM ASEAN (ASEAN SME Policy Index). Indeks kebijakan mencakup berbagai bidang penting UKM, termasuk pendirian usaha baru yang lebih murah dan lebih cepat, pendidikan dan

pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, peningkatan kemampuan teknologi, akses pemasaran di ASEAN, dan pengembangan UKM di kebijakan nasional. Indeks tersebut diharapkan dapat memfasilitasi harmonisasi kebijakan, memperkuat koordinasi kebijakan dan program untuk pengembangan UKM pada program regional, dan sebagai instrumen untuk peningkatan kapasitas bagi penentu kebijakan dan UKM.

2. Membuat standar ASEAN tentang prosedur proses registrasi usaha yang efisien dengan mengacu pada internasional best practise. .
3. Menyusun sistem informasi dan database UKM ASEAN untuk business matching, penerapan secara efektif rintisan ASEAN dan program-program dukungan UKM.
4. Mengembangkan program komplemen atau pendekatan untuk penyediaan pembiayaan UKM dengan penjaminan dalam jumlah sedikit. Termasuk, skim-skim garansi atau asuransi kredit, credit rating atau pemeringkatan resiko peminjam, pendekatan "satu penasehat keuangan-satu Desa", dan pelatihan manajemen resiko dan pemeringkatan resiko peminjam bagi lembaga pembiayaan lokal.
5. Mengembangkan penasehat bisnis, jasa manajemen keuangan dan kewirausahaan bagi UKM
6. Mengembangkan jasa keuangan non tradisional untuk memfasilitasi pertumbuhan UKM, misalnya venture capital dan leasing.
7. Mengembangkan UKM ASEAN untuk memenuhi standar internasional dengan pendekatan berjenjang.
8. Memfasilitasi kolaborasi diantara UKM di tingkat regional untuk menerapkan standar yang ditentukan melalui tahapan berjenjang.
9. Penguatan rekayasa kemampuan UKM ASEAN melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan teknis
10. Mengintegrasikan UKM ASEAN pada jaringan produksi secara regional.

Dalam Sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM mendorong ERIA untuk membantu mengembangkan Indeks Kebijakan UKM untuk ASEAN. Menteri juga menyetujui agar rekomendasi-rekomendasi hasil Simposium tersebut disampaikan Delegasi Indonesia pada rapat AEM (ASEAN Economic Ministers).

